

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Empiris

Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, antara lain

Tabel 2. 1 Landasan Empiris

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Penelitian		Hasil Penelitian
			Persamaan	Perbedaan	
1	Akidah Fitrah & Puji Handayati, 2022	Analisis Efisiensi Anggaran Pada Instansi Pemerintahan Badan Layanan Umum	Menganalisis efisiensi penggunaan anggaran	1. obyek penelitian berbeda 2. Sumber data penelitian berbeda	1. Nilai efisiensi dengan kategori Sangat Efisien terdapat pada keluaran Layanan Pendidikan (PNBP). 2. Nilai efisiensi dengan kategori Cukup Efisien terjadi pada keluaran Layanan Pembelajaran (BOPTN), Buku Pustaka (BOPTN), Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN), Penelitian (PNBP), dan Layanan Perkantoran (PNBP).

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Penelitian		Hasil Penelitian
			Persamaan	Perbedaan	
					<p>3. Nilai efisiensi keluaran dengan Kurang Efisien terjadi pada keluaran Laporan Kegiatan Mahasiswa (BOPTN), Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan dan SDM (BOPTN), Pengabdian Masyarakat (PNBP).</p> <p>4. Nilai efisiensi dengan kategori Sangat Kurang Efisien terjadi pada keluaran Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP), Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP)</p>

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Penelitian		Hasil Penelitian
			Persamaan	Perbedaan	
2	Alful Laila Rosyidah Noor Shofwah, 2019	Analisis Realisasi Anggaran untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Instansi Pemerintah	Menganalisis efisiensi penggunaan anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. variabel efektifitas penggunaan anggaran tidak digunakan 2. obyek penelitian berbeda 3. Sumber data penelitian berbeda 	<p>1. Pengelolaan anggaran belanja di Dinas Sosial Kota Surabaya Pada tahun 2016 tingkat efektivitas dari anggaran belanja Dinas Sosial Kota Surabaya sebesar 94,68% yang berada dalam kategori efektif. Berbeda dengan tingkat efektivitas anggaran belanja pada tahun 2017 sebesar 92,93% dan tahun 2018 sebesar 91,43% yang mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun masih dalam kategori efektif</p>

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Penelitian		Hasil Penelitian
			Persamaan	Perbedaan	
					<p>2. Tingkat atau kriteria efisiensi realisasi anggaran belanja Dinas Sosial Kota Surabaya pada tahun 2016-2018 secara keseluruhan dalam kategori kurang efisien dan mengalami kenaikan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2016 sebesar 95,30% dan di tahun 2017 tingkat efisiensi sebesar 95,41% dan juga di tahun 2018 tingkat efisiensi sebesar 95,55%. Jadi anggaran belanja pada Dinas Sosial Kota Surabaya kurang efisien</p>

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Penelitian		Hasil Penelitian
			Persamaan	Perbedaan	
					<p>3. Pengelolaan anggaran belanja di Dinas Sosial Kota Surabaya Pada tahun 2016 tingkat efektivitas dari anggaran belanja Dinas Sosial Kota Surabaya sebesar 94,68% yang berada dalam kategori efektif. Berbeda dengan tingkat efektivitas anggaran belanja pada tahun 2017 sebesar 92,93% dan tahun 2018 sebesar 91,43% yang mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun hal ini tidak merubah tingkat efektivitas yang masih dalam kategori efektif</p>

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Penelitian		Hasil Penelitian
			Persamaan	Perbedaan	
3	Firman Alimudin, 2021	Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Menganalisis efisiensi penggunaan anggaran	1. variabel efektifitas penggunaan anggaran tidak digunakan 2. obyek penelitian berbeda 3. Sumber data penelitian berbeda	Pengelolaan anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrang sudah efektif. dan pengelolaan anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrang sudah efisien.
4	Berta Agus Petra & Yosi Puspita Sari, 2021	Analisa Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat	Menganalisis efisiensi penggunaan anggaran	1. variabel efektifitas penggunaan anggaran tidak digunakan 2. obyek penelitian berbeda	1. Tingkat efektivitas anggaran PAD Pemerintah Kota Padang pada tahun 2018 lebih bagus dari pada tahun 2019

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Penelitian		Hasil Penelitian
			Persamaan	Perbedaan	
					2. Berdasarkan kriteria tingkat efisiensi, pada tahun 2018 kinerja dari Pemerintahan Kota Padang kurang efisien karena berada pada angka lebih dari 100% sedangkan untuk tahun 2019 cukup efisien karena tingkat efisiensinya berada pada angka 100%.
5	Harry P. Paat, Grace B. Nangoi & Rudy J. Pusung, 2019	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon	Menganalisis efisiensi penggunaan anggaran	1. obyek penelitian berbeda 2. Sumber data penelitian berbeda	1. Pelaksanaan serta pengelolaan anggaran belanja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon periode anggaran tahun 2015-2017 mengalami kenaikan dan penurunan persentase dalam tingkat efektivitas dari keseluruhan periode anggaran belanja ini sudah dinilai baik,

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Penelitian		Hasil Penelitian
			Persamaan	Perbedaan	
					<p>karena mampu menghindari persentase tingkat efektivitas yang kurang efektif yaitu 60-80% dan kurang dari 60% untuk kategori tidak efektif.</p> <p>2. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon telah mengatur efisiensi dari anggaran belanjanya, agar dapat meminimalisir pemborosan dan memaksimalkan pengelolaan dalam penggunaan sumber daya (dana).</p>
6	Magdalena Silawati Samosir, 2021	Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Apbdes)	Menganalisis efisiensi penggunaan anggaran	1. obyek penelitian berbeda 2. Sumber data penelitian berbeda	1. Rata – rata tingkat Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalam Pembagunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Langir

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Penelitian		Hasil Penelitian
			Persamaan	Perbedaan	
		Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2015-2019 (Studi Kasus Pada Desa Langir Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka)			<p>Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2015-2019 sebesar 85 %, termasuk dalam kategori Cukup Efektif.</p> <p>2. Rata-rata tingkat Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Langir sebesar 40%, termasuk dalam kategori sangat Efisien. Tingkat Efisiensi yang paling hemat pada tahun 2015 dengan nilai 24 % dengan kategori Sangat Efisien, sedangkan tingkat Efisiensi yang aling rendah hemanya yaitu, pada tahun 2016 dengan nilai 70 % dengan kategori Efisien</p>

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Penelitian		Hasil Penelitian
			Persamaan	Perbedaan	
7	Efriandi, Rahmat Kurnia, Romy Yunika Putra & Alfi Syukria, 2022	Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Imam Bonjol Padang	Menganalisis efisiensi penggunaan anggaran	1. obyek penelitian berbeda 2. Sumber data penelitian berbeda	Rata-rata efisiensi belanja Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Imam Bonjol Padang dari tahun 2018-2021 sebesar 79.88% dan masuk kedalam kategori efisien.
8	Wahyu Hery Prasetyo & Agustina Prativi Nugraheni, 2020	Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Menganalisis efisiensi penggunaan anggaran	1. obyek penelitian berbeda 2. Sumber data penelitian berbeda	1. Penyerapan anggaran Disdukcapil Kota Magelang periode 2015 – 2019 bervariasi. Selama periode 2015 sampai 2019 hanya di tahun 2018 dan 2019 yang penyerapan anggaranya efektif yaitu sebesar 90,65% ditahun 2018 serta 93,86% ditahun 2019. Namun di tahun 2017 penyerapan anggarannya Kurang efektif dengan

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Penelitian		Hasil Penelitian
			Persamaan	Perbedaan	
		(DISDUK CAPIL) Kota Magelang Periode 2015 – 2019			<p>presentase sebesar 76,91%. Sedangkan penyerapan anggaran di tahun 2015 – 2016 masuk kategori Cukup Efektif dengan presentase masing – masing 89,96 dan 88,97.</p> <p>2. Tingkat efesiensi penyerapan anggaran Disdukcapil Kota Magelang dari periode 2015 – 2019 tidak efisien. Hal tersebut karena masih banyak pos anggaran yang realisasinya tidak sesuai</p> <p>Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Banyak belanja yang tidak sesuai dengan anggaran yang telah disahkan.</p>

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Penelitian		Hasil Penelitian
			Persamaan	Perbedaan	
9	Puji Agus Kurniawan & Djuni Farhan, 2023	<i>Analysis Of Effectiveness And Efficiency Of Expenditure Budget Absorption At Universitas Negeri Malang For The 2019-2021 Fiscal Year</i>	Menganalisis efisiensi penggunaan anggaran	1. obyek penelitian berbeda 2. Sumber data penelitian berbeda	1. <i>absorption of the Malang State University budget for the period 2019 – 2021 is in the stable category. During the period 2019 to 2021 only in 2020, the absorption of the budget was quite effective, namely 80.66%. Meanwhile, budget absorption in 2019 and 2021 is in the Effective category with percentages of 91.75% and 91.82%.</i> 2. <i>the level of efficiency in absorbing the budget of Universitas Negeri Malang for the 2019 2021 fiscal year is less efficient.</i>
10	Sulvariany Tamburaka ,Nasrullah Dali & M. Fauzhan Fathurrachman	<i>Analysis of The Effectiveness And Efficiency of Performance</i>	Menganalisis efisiensi penggunaan anggaran	1. obyek penelitian berbeda 2. Sumber data penelitian berbeda	

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Penelitian		Hasil Penelitian
			Persamaan	Perbedaan	
		<i>Based Shopping Budget in The Government of Kendari City</i>			<i>The 2013-2017 Kendari City Government regional budget as a whole has been processed efficiently where the 2013-2017 regional expenditure budget is in the very efficient category.</i>

2.2. Tinjauan Teoritis

Adapun tinjauan teori untuk menunjang penelitian ini adalah sebagai berikut

2.2.1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya

Sesuai dengan peraturan walikota nomor 73 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya, Dinas perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, urusan pemerintahan bidang Pertanahan serta urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan Persampahan, Permukiman, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Jasa Konstruksi dan Penataan Ruang. Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya berdasarkan perjanjian kinerja serta diselaraskan dengan dokumen Renstra

2021 - 2026 dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya tahun 2021 – 2026. Sebagaimana yang tercantum di dalam dokumen tersebut Visi Kota Surabaya adalah **“Gotong Royong Menuju kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan”** Terhadap Misi Kota Surabaya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya mendukung pada misi ketiga yakni :

“Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan”.

Tujuan dari misi ketiga tersebut ditetapkan sebagai berikut :

- a. Terpenuhinya penataan kota yang terintegrasi didukung infrastruktur berkualitas untuk mendorong konektivitas sosial dan ekonomi masyarakat, dengan sasaran pembangunan Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi.
- b. Meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, nyaman dan indah, dengan sasaran pembangunan Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Dari kedua tujuan ini yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya adalah tujuan yang pertama, yaitu “Terpenuhinya penataan kota yang terintegrasi didukung infrastruktur berkualitas untuk mendorong konektivitas sosial dan ekonomi masyarakat, dengan sasaran pembangunan Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi”.

Dari kedua tujuan ini yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya adalah tujuan yang pertama, yaitu “Terpenuhinya penataan kota yang terintegrasi didukung infrastruktur berkualitas untuk mendorong konektivitas sosial dan ekonomi masyarakat, dengan sasaran pembangunan Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi”

Visi dan Misi Kota Surabaya kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran, dimana tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Tujuan Perangkat Daerah merupakan Sasaran Kota. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya melaksanakan 1 tujuan yaitu Tersedianya Infrastruktur sarana dan prasarana yang

terintegrasi, untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan memiliki 6 sasaran, 9 program, 13 kegiatan dan 18 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Tujuan- Sasaran – Program – Kegiatan- Sub Kegiatan

TUJUAN - SASARAN - PROGRAM - KEGIATAN - SUB KEGIATAN	INDIKATOR
Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi	Indeks Keciptakarya
	Indeks Penataan Ruang
	Indeks Pertanahan
Meningkatnya penyediaan rumah serta prasarana, sarana dan utilitas di kawasan permukiman	Persentase tercapainya penyediaan rumah layak huni
	Persentase penanganan penyerahan PSU
Program pengembangan perumahan	Persentase penghuni rusunawa yang sesuai dengan kriteria
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah ijin/sewa rumah susun dan rumah aset Pemerintah Kota Surabaya
Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah blok rumah susun sederhana yang dikelola
Program kawasan permukiman	Persentase perbaikan rumah tapak tidak layak huni
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jenis perbaikan rumah tapak tidak layak huni
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki
Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Persentase peningkatan pembangunan/rehabilitasi rumah susun sederhana sewa

TUJUAN - SASARAN - PROGRAM - KEGIATAN - SUB KEGIATAN		INDIKATOR
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pelaksanaan pencegahan permukiman kumuh
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah rumah susun sederhana sewa yang dibangun dan direhabilitasi
	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase penanganan penyerahan PSU secara fisik
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas secara administrasi yang diproses
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas secara administrasi yang disusun
	Penyediaan rencana tata ruang yang mengakomodasi pemanfaatan ruang kota	Persentase Pelaksanaan Perencanaan dan Pelayanan Pemanfaatan Ruang
	Program penyelenggaraan penataan ruang	Persentase pelayanan penataan ruang

TUJUAN - SASARAN - PROGRAM - KEGIATAN - SUB KEGIATAN		INDIKATOR
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTr) Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan pelaksanaan teknis Peraturan Daerah dan/atau Kajian teknis pendukung Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RrTR) Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan
	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan pelaksanaan teknis Peraturan Daerah dan/atau kajian teknis pendukung penataan ruang daerah yang disusun
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemanfaatan rencana ruang kota dan informasi penataan ruang kota yang disusun
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pemanfaatan rencana ruang kota
	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah wilayah updating peta Informasi Penataan Ruang
	Meningkatnya penyediaan lahan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum	Persentase penyediaan tanah dan/ atau bangunan untuk kepentingan umum

TUJUAN - SASARAN - PROGRAM - KEGIATAN - SUB KEGIATAN		INDIKATOR
	Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk Pembangunan	Luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tahap pengadaan tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan non infrastruktur
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pengadaan/pembelian tanah dan/atau bangunan yang tertuang dalam dokumen tahapan pengadaan tanah dan/atau bangunan
Tercapainya penyelenggaraan bangunan gedung daerah dan penataan bangunan di Kota Surabaya		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana bangunan gedung milik pemerintah
		Persentase tercapainya pendapatan asli daerah dari retribusi IMB
		Persentase meningkatnya bangunan yang ber IMB
Program penataan bangunan gedung		Persentase jumlah bangunan gedung yang berfungsi baik
		Persentase bangunan yang ber IMB

TUJUAN - SASARAN - PROGRAM - KEGIATAN - SUB KEGIATAN		INDIKATOR
		Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup bangunan yang diselesaikan
		Jumlah bangunan gedung daerah yang dibangun/direhabilitasi dan dilakukan pemeliharaan
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah berkas Perizinan Bidang Tata Bangunan yang diproses
		Jumlah berkas permohonan SLF yang diproses
		Jumlah dokumen penataan bangunan yang disusun
		Jumlah pendataan penyelenggaraan bangunan
		Jumlah lokasi pengawasan bangunan yang dilaksanakan
	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah berkas Perizinan Bidang Tata Bangunan yang terbit dan telah disahkan
		Jumlah berkas permohonan SLF yang terbit dan telah disahkan

TUJUAN - SASARAN - PROGRAM - KEGIATAN - SUB KEGIATAN		INDIKATOR
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Bangunan Gedung Daerah yang Disusun
		Jumlah Bangunan Gedung Daerah yang Dibangun/Direhab
	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penataan bangunan yang terbit dan telah disahkan
	Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Jumlah pendataan dan penyelenggaraan bangunan yang dimasukkan kedalam peta
		jumlah lokasi pengawasan bangunan yang di tindak lanjuti
	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai
	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeliharaan Bangunan Gedung Daerah
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Nilai SAKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	

TUJUAN - SASARAN - PROGRAM - KEGIATAN - SUB KEGIATAN		INDIKATOR
	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi baik

TUJUAN - SASARAN - PROGRAM - KEGIATAN - SUB KEGIATAN		INDIKATOR
Tercapainya penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi di Kota Surabaya		Persentase penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi
Program pengembangan jasa konstruksi		Persentase pembinaan dan peningkatan kapasitas perusahaan jasa konstruksi
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Jenis perusahaan jasa konstruksi yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi		Jumlah perusahaan jasa konstruksi yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya

2.2.2. Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

Sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya. Rumah Tidak Layak Huni atau disingkat (Rutilahu) adalah rumah tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial. Maka Perbaikan Rutilahu adalah proses mengembalikan fungsi sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi rutilahu baik sebagian atau seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong/swadaya masyarakat agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal.

Rutilahu yang dapat diperbaiki adalah bangunan rumah yang dikuasai secara fisik oleh penerima manfaat dan jelas batas-batasnya, dengan kriteria :

- a. Rumah yang tidak memiliki jamban atau sudah memiliki jamban akan tetapi kondisinya kurang layak, kurang pencahayaan dan sirkulasi udara;
- b. Dinding dan/atau atap dalam kondisi rusak dan/atau lapuk yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan penghuni;
- c. Posisi lantai lebih rendah dari jalan dan/atau lantai terbuat dari tanah, papan, bambu, semen atau keramik dalam kondisi rusak;

Kriteria penerima manfaat Kegiatan Perbaikan Rutilahu adalah :

- a. Penduduk Kota Surabaya yang masuk dalam data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); dan
- b. Belum pernah mendapat Bantuan Perbaikan Rutilahu, kecuali untuk korban bencana.

2.2.3. Definis Anggaran

Pada Pernyataan Nomor 2 Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan definisi Anggaran yaitu “Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Definisi lain yang dikemukakan oleh M. Marsono dalam bukunya “Tata Usaha Perbendaharaan Republik Indonesia” memberikan definisi bahwa anggaran adalah suatu rencana pekerjaan yang pada suatu pihak mengandung jumlah pengeluaran yang setinggi-tingginya yang mungkin diperlukan untuk membiayai kepentingan Negara pada suatu masa depan, dan pihak lain perkiraan pendapatan (penerimaan) yang mungkin akan dapat diterima dalam masa tersebut. Berdasarkan dua pernyataan di atas, cenderung beralasan bahwa rencana keuangan adalah konsumsi yang akan diberikan oleh otoritas publik dalam satu periode pengeluaran untuk motivasi di belakang negara untuk memperoleh keuntungan (Tuju et al., 2022).

2.2.4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dalam periode 1 tahun anggaran mulai tanggal 1 januari hingga 31 Desember, yang telah disetujui oleh DPRD. Secara fungsi APBD berfungsi untuk Otorisasi, Perencanaan, Pengawasan, Alokasi, Distribusi, dan Stabilisasi.

APBD pemerintah kota Surabaya tahun 2022 diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, serta diatur pada Peraturan Walikota Surabaya

Nomor 132 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diubah terakhir kali pada Peraturan Walikota Nomor 85 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 132 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan APBD tersebut pembiayaan atas pekerjaan Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dijalankan.

2.2.5. Definisi Efisiensi

Sedarmayanti (2018) memaparkan bahwa Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat atau sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat.

Mahmudi (2018) juga turut memaparkan bahwa Efisiensi merupakan hubungan antara output berupa barang atau jasa yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Secara sistematis, efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input atau dengan istilah lain output per unit input. Konsep efisiensi hampir sama dengan produktivitas suatu organisasi program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output sebesar-besarnya.

Dari berbagai definisi mengenai efisiensi tersebut dapat kita simpulkan bahwa efisiensi adalah penggunaan sumberdaya yang terbatas untuk mendapatkan hasil yang optimal. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat.

2.2.6. Pengukuran Efisiensi

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi dilakukan dengan mengukur

variabel-variabel capaian output, penyerapan anggaran, efisiensi dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.

1. Mengukur Capaian Rincian Output (RO) tingkat satuan kerja

Pengukuran capaian RO tingkat satuan kerja dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$CRO = \left(\prod_{i=1}^m \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right)^{\frac{1}{m}} \times 100\%$$

Keterangan :

CRO : capaian RO tingkat satuan kerja

RVRO_i : realisasi volume RO i

TVRO_i : target volume RO i

m : jumlah RO

2. Mengukur Efisiensi RO tingkat satuan kerja

Pengukuran efisiensi RO yang dilakukan di tingkat RO dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

AARO_i : alokasi anggaran RO i

RARO_i : realisasi anggaran RO i

CRO_i : capaian RO i

3. Mengukur Nilai Efisiensi

Menghitung nilai efisiensi ini dengan melakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar antar 0% sampai dengan 100%, dengan rumus sebagai berikut:

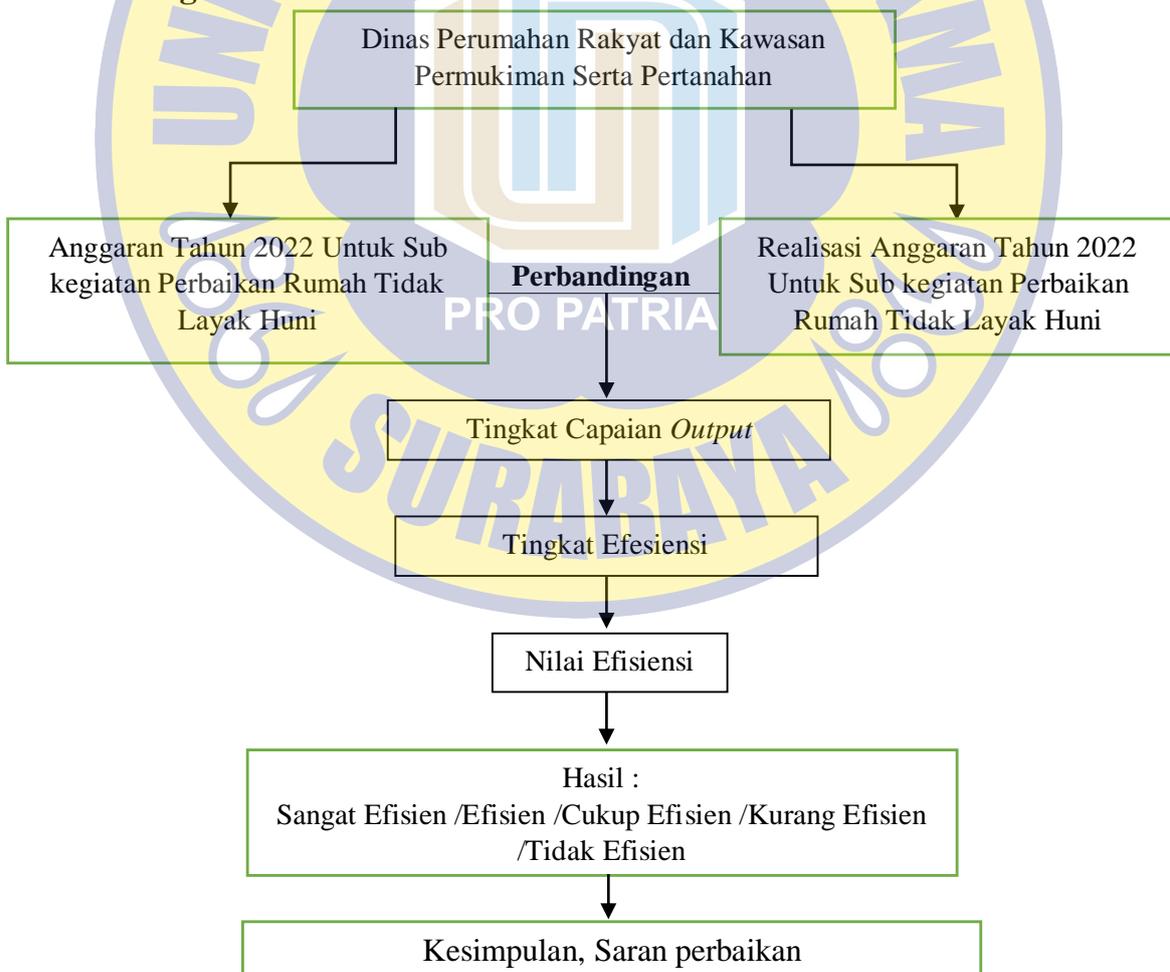
$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right)$$

2.2.7. Kategori Nilai Efisiensi

Menentukan kategori nilai efisiensi dengan kriteria:

- Nilai efisiensi lebih dari 90%, pelaksanaan anggaran dikatakan sangat efisien;
- Nilai efisiensi lebih dari 80% sampai 90%, pelaksanaan anggaran dikatakan efisien;
- Nilai efisiensi lebih dari 60% sampai 80%, pelaksanaan anggaran dikatakan cukup efisien,
- Nilai efisiensi lebih dari 50% sampai 60%, pelaksanaan anggaran dikatakan kurang efisien dan
- Nilai efisiensi dibawah 50%, pelaksanaan anggaran dikatakan sangat kurang efisien (Fitrah & Handayati, 2022).

2.3. Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran